

Komunikasi, **Media**, dan Pemberdayaan Masyarakat

Di Era Pandemi COVID-19



Editor: *Dr. Irsasri, M.Pd.*

Dampak pandemi COVID-19 yang belum mereda hingga saat ini sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan masyarakat. Berbagai daya upaya telah dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi pandemi ini termasuk dampak yang ditimbulkan, jangan sampai masyarakat semakin terpuruk. Namun masyarakat harus tetap eksis, kuat dan berdaya. Sejalan dengan *platform* Prodi Komunikasi STPMD "APMD" yang menawarkan komunikasi pemberdayaan, yaitu komunikasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat pada posisi sebagai subjek bukan lagi sebagai objek.



APMD Press

Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

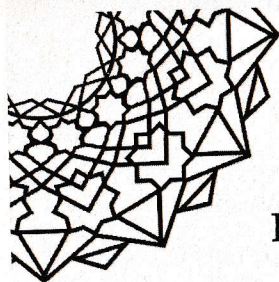
Jln. Timoho 317 Yogyakarta 55225

Email: info@apmd.ac.id www.apmd.ac.id

1 909 0 06 003 0043 00-2



9 786230 643082 >



SINERGI KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Dalam Menghadapi Pandemi COVID 19

Oleh: Yuli Setyowati

A. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 saat ini menjadi pembahasan penting dan *urgent* di dunia global maupun di Indonesia, dan masih berlangsung di hampir seluruh negara di dunia dan memiliki dampak global yang sangat besar. Menurut data *World Health Organization* (WHO) tanggal 13 Desember 2020 tercatat sebanyak 213 negara terjangkit COVID-19 ini dengan 70.461.926 kasus terjangkit, 1.599.704 kasus meninggal. Sedangkan kasus yang terjadi di Indonesia tercatat 617.820 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, 18.819 kasus meninggal (7,8%), 505.836 kasus sembuh (15,0%) (kemenkes.go.id).

COVID-19 ini tidak hanya mengancam kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut selanjutnya akan berdampak pada kualitas hidup manusia, berpotensi menstimuli beragam permasalahan sosial, seperti meningkatnya kriminalitas, melebarnya kesenjangan sosial, terjadi gesekan-gesekan sosial, dan lain sebagainya.

Semua pihak, dalam hal ini termasuk pemerintah, tidak ada yang dapat memastikan kapan berakhirnya

pandemi COVID-19 ini, oleh sebab itu dalam situasi ketidakpastian sangat dibutuhkan penguatan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat agar dampak yang timbul tidak dapat diatasi secara cepat dan bersama-sama. Pada level masyarakat, sinergitas ini berkaitan dengan pembentukan masyarakat siaga COVID-19 sebagai langkah antisipatif untuk kondisi saat ini dan langkah preventif untuk kondisi yang akan datang.

Risiko lanjutan dari pencegahan transmisi COVID-19 melalui *physical distancing*. Kebijakan jaga jarak dan pembatasan mobilitas yang sedianya ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, melahirkan dampak lanjutan, yaitu terganggunya aktivitas bisnis dan ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan yang mulai terjadi di berbagai tempat dan melanda beragam sektor. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi semakin tampak nyata. Ketahanan keluarga juga menjadi melemah akibat dari anggota masyarakat yang harus tetap bekerja atau berpindah ke daerah lain mengalami stigma - kemungkinan sebagai pembawa virus. Kondisi ini tentunya berpotensi memunculkan rasa saling curiga, konflik, kekerasan dan meningkatnya kriminalitas.

Lahirnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk ikut berperan menangani COVID-19. Pada level kognisi sosial, masyarakat mempelajari pengetahuan baru terkait pandemi COVID-19, terkait dengan karakter virus, cara pencegahannya sesuai anjuran pemerintah yaitu melalui

aktivitas 3M (memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak) yang diikuti oleh kesadaran *self-isolation* (isolasi mandiri), karantina wilayah, *study from home*, dan *work from home*; serta berbagai mekanisme menangani dampaknya. Pada level individu, masyarakat memiliki kesadaran higienitas dan kesehatan diri maupun lingkungan, dan secara lebih artikulatif untuk saling mengingatkan. Secara komunal, inisiasi pertahanan diri dibangun di berbagai tingkatan wilayah, termasuk di kampung-kampung, dan institusi-institusi sosial. Hal ini menunjukkan gejala yang baik dengan adanya sinergi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, namun demikian harus dilihat seberapa kuat sinergi kolaborasi ini dapat dipertahankan sehingga menghasilkan solusi terbaik untuk semua.

B. SINERGI KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF KOMUNIKASI

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, sinergi berarti kegiatan atau operasi bersama. Sinergi berasal dari kata *synergos* yang berarti bekerja bersama-sama. Bersinergi berarti melakukan kegiatan secara bersama-sama dan memerlukan koordinasi yang baik, perasaan saling memberi, saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk mencapai suatu maksud tertentu yang telah disepakati bersama.

Sinergi kolaborasi pada hakikatnya merupakan kerjasama yang mengindikasikan adanya dua pihak atau

lebih yang berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Dalam setiap kerjasama terdapat tiga unsur penting Pamudji yaitu: 1) adanya dua pihak atau lebih; 2) adanya unsur interaksi; dan 3) adanya unsur tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya unsur dua pihak atau lebih biasanya menggambarkan suatu himpunan dari berbagai kepentingan yang saling mempengaruhi, sehingga akan menciptakan suatu hubungan atau interaksi demi mewujudkan tujuan bersama. Jadi, sinergi dapat diartikan sebagai suatu hubungan atau jalinan kerjasama antara beberapa pihak dan menempatkan pihak-pihak yang bersangkutan tersebut pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

Sinergi dapat dipandang sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik. Sinergi dapat terbangun jika ada komunikasi dan koordinasi (Najiyati dan Susilo, 2011).

Ruben dan Stewart (2013) menyatakan bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi individu, relasi, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Komunikasi merupakan garis yang menghubungkan manusia dengan dunia, komunikasi sebagai sarana manusia untuk mengekspresikan diri dan memengaruhi orang lain, serta membuat kesan tentang dan kepada

dunia. Karena itu, jika manusia tidak berkomunikasi maka dia tidak dapat menciptakan dan memelihara relasi dengan sesama dalam kelompok, organisasi dan masyarakat. Jadi komunikasi memungkinkan manusia mengkoordinasikan semua kebutuhannya dengan dan bersama orang lain.

Orientasi komunikasi dapat dibedakan menjadi dua (Sofyandi dan Garniwa, 2007), yaitu: 1) komunikasi yang berorientasi pada sumber kegiatan guna mendapatkan tanggapan; 2) komunikasi yang berorientasi pada penerima, memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan penerima dalam menanggapi stimulus. Untuk memperkuat sinergi kolaborasi kedua orientasi komunikasi ini harus ditopang oleh adanya koordinasi. Silalahi (2011) menyebut koordinasi sebagai integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.

Dalam proses komunikasi dan koordinasi pemerintah dengan masyarakat, terdapat pula aspek penting yaitu adanya kepercayaan (*trust*) pemerintah kepada masyarakat, dan sebaliknya masyarakat kepada pemerintah. Sinergi kolaborasi akan semakin menguat jika masing-masing pihak saling menaruh kepercayaan bahwa kerjasama atau sinergi tersebut didasari oleh tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan akan menghasilkan keadaan yang lebih baik bagi masyarakat. Covey (2011) menegaskan bahwa sinergitas akan mudah

terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang, dan saling menghargai. Dari pendapat Covey, dapat dikatakan bahwa sinergitas tidak akan terwujud jika masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga tidak terdapat kesamaan persepsi dan tidak dapat saling menghargai satu sama lain.

C. TINDAKAN KOMUNIKATIF DALAM MEWUJUDKAN SINERGI KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Untuk memperkuat sinergi kolaborasi juga dibutuhkan solidaritas. Solidaritas dapat dimaknai sebagai perasaan saling percaya, menjadi terdorong untuk bertanggungjawab dan memperhatikan kepentingan sesama. Tindakan mementingkan diri sendiri dan kelompok sudah harus dihilangkan. Solidaritas sosial menurut Emile Durkheim (Ritzer, 2008) merupakan suatu gejala moral. Bagi bangsa Indonesia, solidaritas sosial merupakan kekuatan sebagai bangsa yang majemuk. Tim Fisipol UGM melalui diskusi mengenai COVID-19 mengeluarkan beberapa *policy brief*, diantaranya menyangkut solidaritas sosial, direkomendasikan bahwa solidaritas sosial dapat dikelola baik pada level akar rumput maupun pemerintah. Pada level akar rumput difokuskan pada penguatan masyarakat yang berpijak pada informasi yang benar tentang COVID-19 sehingga akan terbangun kepercayaan diri masyarakat dan selanjutnya mereka mampu mengelola dirinya dengan

berbagai bentuk solidaritas sosial. Pada level pemerintah lebih ditekankan pada peran fasilitatif dan advokatif untuk mendukung terciptanya solidaritas sosial anatargolongan masyarakat (<https://fisipol.ugm.ac.id/policy-brief-4-penguatan-solidaritas-sosial-di-tengah-krisis-COVID-19/>).

Dalam konteks pandemi COVID-19, sinergi kolaborasi pemerintah dan masyarakat yang dilihat dari aspek komunikasi dan koordinasi akan terlihat dari tindakan komunikatif masyarakatnya. Bahasa sebagai unsur penting dalam komunikasi sangat berpengaruh pada terbentuknya tindakan komunikatif masyarakat sebagai hasil dari adanya interaksi antarsubjek dalam proses komunikasi tersebut. Seperti ungkapan Habermas (Hardiman, 2009) bahwa tindakan komunikatif diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan harapan timbal balik diantara subjek-subjek yang berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, khususnya bahasa sehari-hari sebagai medium bagi tindakan tersebut. Dalam hal ini bahasa dalam komunikasi menjadi unsur yang sangat penting untuk menghasilkan tindakan komunikatif tertentu. Tindakan komunikatif ini muncul sebagai hasil interaksi antarsubjek sesuai dengan kesepakatan di antara subjek tersebut. Tindakan komunikatif pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat tergantung dari proses komunikasi yang menghasilkan persepsi yang positif dan kesepakatan

antarpihak yang berkomunikasi. Persepsi positif tersebut sangat mendukung terbangunnya tindakan yang mendukung munculnya partisipasi aktif masyarakat berupa keterlibatan aktif masyarakat dan kesukarelaan dalam bertindak. Penelitian Setyowati (2017) menunjukkan bahwa tindakan komunikatif masyarakat ditinjau dari teori Habermas memperlihatkan adanya kemampuan masyarakat menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma yang disepakati bersama untuk mengontrol perilaku mereka sendiri atau disebut *self-regulation*. Berfungsinya kelompok-kelompok sosial menjadi ruang-ruang publik bagi masyarakat untuk berekspresi, sehingga menumbuhkan emansipasi dan solidaritas di kalangan masyarakat.

Apapun alasannya, sebuah bencana atau wabah seperti COVID-19 akan dapat lebih mudah ditangani atau ditaklukkan jika masyarakat bersinergi dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Diharapkan muncul kesadaran bahwa ini adalah persoalan bersama sebagai sebuah bangsa, dan menggalang kekuatan bersama-sama untuk saling tolong-menolong menanggulangi wabah ini.

Di Indonesia, wabah COVID-19 ini sudah terjadi di seluruh wilayah provinsi (34 provinsi) dan terdapat 321 kabupaten/kota telah terjangkiti (kemenkes.go.id). Indonesia dengan kekuatan solidaritas mekaniknya sangat dimungkinkan membentuk kesadaran kolektif,

artinya sebagai suatu bangsa yang sedang menghadapi wabah, Indonesia harus menyadari bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk bekerja sama, kekuatan untuk bersinergi. Sinergi kolaborasi akan terbentuk dan semakin kuat jika semua komponen bangsa mampu membuang jauh-jauh pikiran picik dalam berperang melawan pandemi. Pemerintah menjadi kunci dalam memperkuat sinergitas dan meyakinkan masyarakat untuk bergerak bersama-sama agar pekerjaan berat dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi lebih mudah. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat menjadi syarat terbentuknya sinergi kolaborasi yang kuat.

Upaya pemerintah dapat dilihat dari adanya beberapa regulasi berkaitan dengan penanganan COVID-19, yaitu dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah agar berada dalam satu garis visi yang sama. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang diikuti oleh terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Untuk meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional antarkementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), terutama pasal 3

yang mengatur tujuan dibentuknya gugus tugas. Jika dilihat dari beberapa regulasi tersebut, pemerintah telah menetapkan strategi penanganan COVID-19, walaupun dapat dikatakan langkah tersebut agak terlambat dan kurang antisipatif.

Belajar dari beberapa riset tentang komunikasi strategis serta relasi sinergis antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa membangun sinergitas bukan sesuatu hal yang mudah. Najiyati dan Susilo (2011) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat yaitu adanya kesulitan masyarakat dalam menerapkan program karena adanya ketidaksamaan persepsi antara tim pemerintah dengan masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah pusat, tidak adanya masterplan sebagai acuan kerjasama serta sulitnya mencari relawan dari pihak masyarakat. Tidak adanya persamaan persepsi menjadi penghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat juga ditemui dalam penelitian Fahmy dkk (2013), di samping juga dari pihak pemerintah sendiri tidak optimal mendampingi dan memberikan bimbingan kepada masyarakat.

Upaya membangun sinergi kolaborasi sering mengalami kegagalan karena pemerintah menjadi pihak yang sangat dominan sehingga komunikasi yang terjadi bersifat satu arah dan tidak terwujudnya koordinasi antarpihak (Rahmawati dkk, 2014), koordinasi dan anggaran yang minim (Anggraini, 2014), serta

ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan potensi masyarakat secara optimal (Wahyudia dkk, 2018). Oleh sebab itu sinergi kolaborasi akan terbangun dan dapat diperkuat jika memenuhi beberapa indikator, yaitu komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas (Kurniawan dan Retno Suryawati, 2017). Dwinugroho (2017) menyebutkan bahwa sinergitas pemerintah dan masyarakat akan optimal jika terdapat komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai kelompok masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penguatan sinergi kolaborasi, dibutuhkan beberapa hal, yaitu: strategi komunikasi publik untuk membentuk kesepahaman dan menjaga relasi yang saling menguntungkan antarpihak (Zubair dkk, 2018), perencanaan baik secara internal maupun eksternal (Sudarman, 2018), serta perencanaan komunikasi strategis dari aspek komunikator, khalayak, pesan maupun mediana (Kalianda, 2018). Disamping adanya komunikasi strategis dalam menciptakan sinergi kolaborasi juga memerlukan koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi (2005). Silalahi (2011), "koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama".

Moekijat (1994) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu :

1. Hubungan langsung: koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.
2. Kesempatan awal: koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.
3. Kontinuitas: koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.
4. Dinamisme: koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.
5. Tujuan yang jelas: tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
6. Organisasi yang sederhana: struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

8. Komunikasi yang efektif: komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.
9. Kepemimpinan supervisi yang efektif: kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang.

Sejak pandemi COVID-19 hadir di Indonesia terdapat beberapa anjuran pemerintah untuk ditaati oleh masyarakat, yaitu: 1) kerja dari rumah (*work from home/WFH*), belajar dari rumah (*study from home/SFH*), dan ibadah di rumah; 2) melakukan *social dan physical distancing*; dan 3) selalu menjaga kesehatan yang sudah ditaati oleh masyarakat, yang akhirnya mengarah menjadi kebiasaan masyarakat. Ketaatan (Jawa: mituhu) masyarakat kepada anjuran pemerintah merupakan sikap luhur sebagai bentuk etika dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk membantu pemerintah memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Ketaatan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dapat dilihat dari gerakan yang telah dilakukan di berbagai wilayah, sebagai hasil sinergi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan Kota Tangerang telah dibentuk Kampung Siaga COVID-19; Provinsi Jawa Barat membentuk Desa Siaga COVID-19; Pemerintah Kota Bandung mengencarkan pembentukan RW Siaga COVID-19, dan Pemerintah Kabupaten Bogor

membentuk RW Siaga *Corona* (sumber: detiknews). Selain wilayah-wilayah tersebut, sangat dimungkinkan wilayah lain pun juga bergegas untuk menyiapkan masyarakat siaga COVID-19. Pada dasarnya, pembentukan masyarakat siaga COVID-19 tersebut bertujuan untuk mencegah warga tertular virus *Corona* dengan cara mengajak masyarakat mengenali lingkungannya secara lebih serius, mengidentifikasi orang yang sering keluar masuk kampung, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan sistem keamanan lingkungan, edukasi informasi kepada warga, pendataan dan pemetaan warga yang rentan penyakit, pendataan warga yang pulang mudik dari wilayah lain, identifikasi fasilitas-fasilitas kampung untuk dijadikan ruang isolasi, dan lain sebagainya.

Upaya-upaya penguatan sinergi kolaborasi pemerintah dan masyarakat harus ditopang dengan prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong ini dimanifestasikan melalui pengorganisasian solidaritas sosial bagi kelompok rentan di wilayahnya, tersedianya masyarakat yang sanggup menjadi relawan, terbentuknya kerangka kerja relawan secara jelas dan komprehensif, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, literasi media untuk menghindarkan masyarakat termakan hoaks sehingga masyarakat akan mendapatkan ketenangan.

Gotong royong ini merupakan modal sosial masyarakat Indonesia. Coleman (Filed, 2010) menyatakan bahwa modal sosial tidak terbatas pada golongan yang

kuat, namun juga mencakup manfaat riil yang bagi golongan miskin dan terpinggirkan. Modal sosial merupakan representasi sumber daya yang melibatkan harapan akan resiprositas dan mampu melampaui individu manapun sehingga mampu membentuk jaringan yang lebih luas. Dalam jaringan tersebut, terdapat hubungan-hubungan yang diatur oleh tingginya tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Masyarakat Indonesia dengan modal sosial gotong royongnya sangat dekat dengan ciri-ciri *gemeinschaft* atau paguyuban (Cooley, 2014), di mana individu berkembang dan dididik sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan upaya mengembangkan sifat-sifat sosial seperti mengindahkan norma-norma, melepaskan kepentingan dirinya demi kepentingan kelompok, belajar bekerjasama dengan individu lain, dan mengembangkan potensinya untuk kepentingan kelompoknya.

Tumbuhnya solidaritas sosial di kalangan akar rumput masyarakat Indonesia berakar pada karakter masyarakat lokal Indonesia yang kental dengan semangat komunalitas dan semangat gotong royong. Meski demikian, terdapat sejumlah agenda yang bisa dikembangkan untuk membangun dan mengelola solidaritas sosial, terbagi di level akar rumput dan pemerintah. Agar solidaritas sosial pada level akar rumput dapat berjalan produktif dan berumur panjang, solidaritas sosial sebaiknya dibangun berbasiskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan kolaborasi antar institusi dan aktor di masyarakat, seperti filantropi, swasta, keagamaan, nongovernmental organization, tokoh masyarakat, komunitas lokal dan kelompok-kelompok kepemudaan;
2. Menyebarluaskan kisah-kisah keberhasilan dan inisiasi positif lokal;
3. Menyesuaikan aksi-aksi bantuan dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang tersedia;
4. Membantu memfasilitasi anggota masyarakat yang harus melakukan isolasi diri dengan menyediakan akomodasi maupun konsumsi;
5. Berpijak pada informasi yang benar tentang COVID-19 untuk menghindari diskriminasi dan stigmatisasi;
6. Memperkuat literasi untuk edukasi seputar COVID-19 melalui media massa, media sosial, dan sarana komunikasi tradisional yang sesuai dengan karakter masyarakat lokal;
7. Belajar dari pengalaman pengelolaan situasi krisis pada masa lalu atau dari daerah lain;
8. Pemetaan kelompok-kelompok dan golongan-golongan rentan yang layak menerima bantuan tanpa diskriminasi;
9. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi termasuk media sosial;

10. Membantu menjaga kesehatan mental psikologis masyarakat dengan berbagai pendekatan.

Sejumlah bentuk solidaritas sosial yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat edukasi seputar COVID-19 melalui media massa, media sosial, dan sarana komunikasi tradisional yang sesuai dengan karakter masyarakat lokal;
2. Memberikan sumbangan dana dan bahan makanan pokok bagi pekerja dan buruh yang mengalami pemotongan upah/pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kelompok rentan dan ekonomi lemah lainnya.
3. Memperkuat ketahanan keluarga sebagai garda terdepan dalam upaya menjaga imunitas dan kedisiplinan *physical distancing*;
4. Membangun kepercayaan dan mencegah stigmatisasi yang berpotensi mengeksklusi individu atau kelompok tertentu;
5. Memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi kelompok masyarakat yang tetap harus bekerja seperti tenaga medis, pekerja pos, kurir, ekspedisi, transportasi, jurnalis, buruh industri pangan serta pertanian dan perkebunan, petugas kebersihan dan satuan pengamanan publik;

6. Menggalang dana masyarakat untuk membiayai aksi-aksi digital dan nyata melawan COVID-19 ;
7. Menyesuaikan aksi-aksi bantuan dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang tersedia;
8. Membantu memfasilitasi anggota masyarakat yang harus melakukan isolasi diri dengan menyediakan akomodasi maupun konsumsi.

Potensi solidaritas sosial untuk membantu penanganan krisis COVID-19 sangat besar. Akan tetapi, peran pemerintah tetap diperlukan agar solidaritas sosial dapat dikelola secara positif. Selain itu, tidak semua aspek dari tatanan sosial dan ekonomi yang terdampak dari krisis COVID-19 itu dapat ditangani oleh solidaritas sosial yang tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bisa mengelola solidaritas sosial dengan cara berikut:

1. Mengelola koordinasi antar struktur masyarakat tingkat desa untuk mengundang partisipasi warga dalam upaya menggalakkan kepedulian dan rasa kemanusiaan;
2. Menggunakan teknologi untuk memetakan potensi solidaritas sosial oleh warga masyarakat lokal dalam membantu penanganan krisis COVID-19 ;
3. Melakukan intervensi ekonomi untuk mengatasi dampak jangka panjang krisis, jika

terjadi gelombang kedua pandemi, dan mempercepat pemulihan ekonomi (melalui BLT, keringanan cicilan kredit, menjamin upah buruh dibayar penuh, dan mendukung tumbuhnya sektor ekonomi baru terkait COVID-19);

4. Mendukung terciptanya solidaritas sosial antar golongan dan kelas di masyarakat;
5. Memfasilitasi pertukaran informasi di masyarakat tentang kelompok-kelompok sosial dan komunitas-komunitas yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, maupun penyebaran kisah-kisah positif seperti kesembuhan dan aksiaksi solidaritas sosial yang berhasil;
6. Memastikan kelompok paling rentan di masyarakat akibat krisis COVID-19 diutamakan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan institusi-institusi lain di masyarakat.

Mengingat durasi pandemi COVID-19 yang nampaknya akan berlangsung panjang, maka dibutuhkan transformasi solidaritas sosial yang bersifat organik dari masyarakat menjadi lebih terlembaga dan bertahan lama. Untuk itu, sangat penting membangun sinergi kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam rangka menjadikan solidaritas sosial sebagai elemen penting dalam penanganan COVID-19 .

Covey dalam Wati (2013) mengartikan sinergi sebagai "kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang

dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar'. Indikator untuk menganalisis sinergi kolaborasi dapat mengacu pada Doctoroff, yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Komunikasi yang efektif ditandai oleh komunikasi dua arah dan saling timbal balik yang menandakan seluruh pihak memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi ini dapat dilakukan terjadi secara tatap muka maupun menggunakan media. Komunikasi yang efektif menimbulkan adanya umpan balik atau *feedback* yang cepat di antara pemerintah dengan masyarakat. Kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilihat adanya keterbukaan, saling berbagi sumber daya, saling menerima, memberikan dukungan, dan saling bekerjasama dalam melakukan berbagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Indikator terakhir adalah kreativitas, dalam arti bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 ini dibutuhkan kreativitas bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat tidak mengalami kepanikan dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari di tengah kesulitan masa pandemi dengan penuh semangat agar imunitas tetap terjaga dengan baik.

Harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat, apalagi dari hari ke hari jumlah kasus positif COVID-19

terus meningkat signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi. Sudah saatnya menghilangkan pertikaian, politisasi, dan saling menyerang seperti saat menghadapi konstestasi politik, sebab perang melawan virus *Corona* adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Indonesia perlu belajar dari China dan Italia dalam perang melawan COVID-19. Ketika dihantam badai COVID-19, masyarakat China saling menguatkan patuh pada instruksi pihak otoritas dengan mengatakan "*Wuhan, jiyao*", yang artinya "Wuhan, kamu pasti bisa". Setelah berhasil melokalisasi virus *Corona*, masyarakat China khususnya Wuhan memberi penghormatan yang tulus kepada tenaga medis, petugas keamanan dan para relawan yang telah berjuang bersama dalam melawan virus *Corona*, dengan cara mereka memberikan bermacam-macam hadiah dengan tulus. Demikian juga dengan Italia, mereka juga bersemangat dari rumahnya masing-masing menyanyikan lagu-lagu heroik dan mengibarkan bendera negara lewat jendela rumahnya. Masyarakat Italia berusaha menguatkan pemerintah sekaligus memberikan pesan pada dunia bahwa "Kami bersama pemerintah melawan virus *Corona*". ([Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/194523965/saling-menguatkan-menghadapi-COVID-19) "Saling Menguatkan Menghadapi COVID-19", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/194523965/saling-menguatkan-menghadapi-COVID-19>).

Sinergi kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan ciri dari *good governance* yang ditandai oleh adanya penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pencapaian tujuan nasional ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability securing of human right, autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini, tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien. (Sedarmayanti, 2004:4)

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti, 2004).

D. PENUTUP

Simpul dari pembahasan ini adalah bahwa kunci penanganan pandemi COVID-19 adalah adanya kesatuan langkah atau adanya sinergi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi kolaborasi inilah yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampak di kemudian hari dengan prinsip bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat harus

terjamin. Sinergi kolaborasi pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat sebagai upaya meminimalkan risiko bagi masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat, memberdayakan, mengapresiasi, memberi kepercayaan dan memfungsikan semua elemen yang ada pada pemerintah maupun masyarakat menuju pada tindakan komunikatif bersama yang efektif untuk menghadapi pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Novita. Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Gunung Bromo. *Jurnal Administrasi Publik. Jurnal Elektronik Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya*. Vol. 2 No. 6 (2014). Web. 30 April 2020.
- Cooley, Charles Horton. 2014. *Two Major Works Social Organization Human Nature and The Social Order*. Primary Source Edition. Paperback, Baru: Babu Press. Print.
- Covey, S.R. *The 7 Habits of Highly Effective People*. Review. Free Press, 2011. Print.
- Dwinugraha, Akbar Pandu. Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*. Volume 2, Nomor 1, April 2017. 1-7. Web. 30 April 2020.
- Fahmy, Amri Yulian dkk. Pelaksanaan Program Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis

- Komunitas. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 2013. 1159-1167. Web. 30 April 2020.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial*. Diterjemahkan oleh Nurhadi dari buku asli *Social Capital* (2003). Bantul DIY: Kreasi Wacana. Print.
- Fisipol UGM. Policy Brief #4 Penguatan Solidaritas Sosial di Tengah Krisis COVID-19. Web. 30 April 2020.
- Kalianda, Deri. Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Mengimplementasikan Program Green City Di Kota Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 - April 2018. Web. 30 April 2020.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Web. 29 April 2020.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Web. 29 April 2020.
- Kemendkos.go.id. Situasi COVID-19. Web. 30 April 2020.

- Kurniawan, Jovi Andre dan Retno Suryawati. Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 1, 2017. 39 - 45. Web. 29 April 2020.
- Moekijat. (1994). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju
- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo. Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian*, Vol. 28 (2) Desember 2011.113-124. Web. 29 April 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Web. 29 April 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Web. 29 April 2020.

- Rahmawati, Triana dkk. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, 2014. 641-647. Web. 30 April 2020.
- Ritzer, George - Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Dialihbahasakan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Print.
- Ruben, Brent D & Steward, Lea P. 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Edisi Kelima. Terjemahan Ibnu Hamad dari buku *Communication and Human Behavior (Fifth Edition)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Print.
- Setyowati, Yuli. "Kampung Preman" Community Empowerment In Communicative Action Theoretical Study (A Case Study in Yogyakarta Indonesia). *Advances in Social Sciences Research Journal* Vol 4 No 13 (2017). Web. 30 April 2020.
- Silalahi, Ulbert. *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama, 2011. Print.

- Sofyandi, Herman dan Iwa Garniwa. *Perilaku Organisasional*. Edisi Pertama, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. Print.
- Sudarman, Asep. Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 1 (2018). 39-60. Web. 30 April 2020.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Wahyudia, Dicky dkk. Sinergitas Organisasi Publik Dengan Mengimplementasikan Sukuk Wakaf Melalui Pembentukan Halal Center Industry. *SNKN 2018 | Simposium Nasional Keuangan Negara*. 718-743. Web. 30 April 2020.
- Wati, Susilo, Zauhar, Soesilo dan Ike Wanusmawatie. 2013. "The Implementation of Partnership Program in Gresik Regency Based on Governance Perspective (Case Study in PT Petrokimia Gresik)." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.1, No.5 2013

Zubair, Feliza , dkk. Strategi Komunikasi Publik Dalam Membangun Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan PTNBH, *Jurnal Komunikasi Profetik UIN Sunan Kalijaga* Vol 11, No 2 (2018). Web. 29 April 2020.



PERAN KOMUNIKASI *HUMAN INITIATIVE (HI)* YOGYAKARTA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Oleh: Agus Triyono, Habib Muhsin

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Edi Suharto, 2005)

Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, sedangkan pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian